

Transparansi Data Pembangunan Kesehatan Perspektif Open Government Data

Transparency of Health Development Data from Open Government Data Perspective

Mariam Rista Aulia Nurrahma¹

¹Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga
Corresponding author: mariam.rista.aulia-2014@fisip.unair.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to describe the disclosure of local government health development data in the perspective of public data disclosure. Open data that is interoperable with high accessibility and easy to access so that it can assist the government and the public in integrating planning, implementation, monitoring, evaluation, and control of development. This study used descriptive qualitative method. The data collection technique used was in-depth interview method. The informant determination technique uses a purposive technique where the selected informant is the party who is considered to know and understand the most. The result of the research is that the openness of local government health development has not been optimal. The data lacks a level of detail, is not updated, and is not published in an open format.

Keywords: *Open Government Data, transparency, local government*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan keterbukaan data pembangunan kesehatan pemerintah lokal dalam perspektif keterbukaan data publik. Open data yang memiliki sifat interoperabel dengan aksesibilitas yang tinggi dan mudah diakses sehingga dapat membantu pemerintah dan publik dalam memadukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara mendalam. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive dimana informan yang dipilih adalah pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami. Hasil penelitian adalah keterbukaan pembangunan kesehatan pemerintah lokal belum optimal. Data tidak memiliki tingkat detail, tidak update, dan tidak dipublikasikan dalam format terbuka.

Kata kunci: open government data, transparansi, pemerintah lokal

Pendahuluan

Open Government Data pemerintah dapat digunakan untuk membantu masyarakat lebih memahami apa yang pemerintah lakukan dan seberapa baik kinerjanya, dan untuk meminta pertanggungjawaban atas hasil yang salah ataupun tidak diraih. Faktual problem yang melatar belakangi penelitian ini adalah berdasarkan perbandingan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) tahun 2007 dan 2013 di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya merupakan daerah yang mengalami penurunan tertinggi, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1

Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Jawa Timur

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat IPKM 2007	Peringkat IPKM 2013	Peringkat Pengembangan IPKM 2013	Perubahan Peringkat IPKM 2013	Perubahan Peringkat Pengembangan IPKM 2013
3501	KAB. PACITAN	103	178	227	Turun	Turun
3502	KAB. PONOROGO	100	70	65	Naik	Naik
3503	KAB. TRENGGALEK	128	142	199	Turun	Turun
3504	KAB. TULUNGAGUNG	28	90	97	Turun	Turun
3505	KAB. BLITAR	97	191	251	Turun	Turun
3506	KAB. KEDIRI	56	133	134	Turun	Turun
3507	KAB. MALANG	166	207	211	Turun	Turun
3508	KAB. LUMAJANG	202	294	326	Turun	Turun
3509	KAB. JEMBER	215	330	363	Turun	Turun
3510	KAB. BANYUWANGI	164	213	263	Turun	Turun
3511	KAB. BONDOWOSO	229	378	295	Turun	Turun
3512	KAB. SITUBONDO	235	307	301	Turun	Turun
3513	KAB. PROBOLINGGO	309	325	285	Turun	Turun
3514	KAB. PASURUAN	147	240	187	Turun	Turun
3515	KAB. SIDOARJO	44	78	175	Turun	Turun
3516	KAB. MOJOKERTO	62	114	89	Turun	Turun
3517	KAB. JOMBANG	73	110	120	Turun	Turun
3518	KAB. NGANJUK	53	44	35	Naik	Naik
3519	KAB. MADIUN	41	111	91	Turun	Turun
3520	KAB. MAGETAN	59	91	130	Turun	Turun
3521	KAB. NGAWI	67	141	165	Turun	Turun
3522	KAB. BOJONEGORO	120	242	158	Turun	Turun
3523	KAB. TUBAN	160	217	138	Turun	Naik
3524	KAB. LAMONGAN	131	147	105	Turun	Naik
3525	KAB. GRESIK	70	102	169	Turun	Turun
3526	KAB. BANGKALAN	302	333	380	Turun	Turun
3527	KAB. SAMPANG	426	272	311	Naik	Naik
3528	KAB. PAMEKASAN	371	400	417	Turun	Turun
3529	KAB. SUMENEP	365	390	410	Turun	Turun
3571	KOTA KEDIRI	35	14	3	Naik	Naik
3572	KOTA BLITAR	30	22	52	Naik	Turun
3573	KOTA MALANG	22	39	32	Turun	Turun
3574	KOTA PROBOLINGGO	90	113	111	Turun	Turun
3575	KOTA PASURUAN	18	80	38	Turun	Turun
3576	KOTA MOJOKERTO	20	54	14	Turun	Naik
3577	KOTA MADIUN	10	8	6	Naik	Naik
3578	KOTA SURABAYA	21	74	149	Turun	Turun
3579	KOTA BATU	15	40	42	Turun	Turun

Berdasarkan pada tabel tersebut, apabila dibandingkan pada tahun 2007 dan 2013 dengan indikator yang sama, peringkat Kota Surabaya mengalami penurunan sebesar 53, dan apabila dibandingkan antara indikator tahun 2007 dengan pengembangan indikator pada tahun 2013, peringkat Kota Surabaya mengalami penurunan sebesar 128.

Studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini ialah “*Public Information Disclosure in Open Government Towards Good Governance*” yang ditulis oleh Nunuk Febrianingsih. Penelitian berfokus pada upaya penulis untuk menilai kesiapan lembaga-lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan UU KIP dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya UU KIP dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi dari badan publik. Hal tersebut dapat dilihat melalui kesimpulan dalam penelitian ini yang mana UU KIP menghendaki tersedianya informasi secara lengkap, tersusun rapi, dan terpusat pada satu institusi badan informasi sehingga, informasi yang dibutuhkan menjadi mudah di akses baik oleh pegawai pemerintah maupun masyarakat yang secara otomatis dapat bersifat efektif dan efisien. UU KIP ini mengandung beberapa azas diantaranya *pertama* setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. *Kedua*, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. *Ketiga*, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan melalui cara yang sederhana. *Keempat*, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

Pada penelitian ini memberi penegasan bahwa lembaga pemerintah belum terlalu siap untuk mengimplementasikan UU KIP. Hal ini terlihat dari belum dilakukannya langkah-langkah yang diamanatkan UU KIP oleh mayoritas badan publik seperti belum membuat peraturan internal mengenai pelaksanaan UU KIP, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan menetapkan daftar informasi publik yang terbuka dan yang dikecualikan. Penelitian ini mampu melihat bahwa hanya terdapat 22 lembaga publik yang telah membuat regulasi internal dan menunjuk PPID.¹⁷ Adapun perbedaan antara studi terdahulu dengan penelitian saat ini ialah peneliti berfokus pada

sumber dimana sebelum informasi dibuat yakni pada data yang diberikan oleh pemerintah kepada publik secara terbuka. Selain itu penelitian saat ini juga difokuskan pada mendeskripsikan keterbukaan data Pemerintah Kota Surabaya pada bidang pembangunan kesehatan dalam perspektif *open government data*.

Studi lain berjudul “*Open Data: Quality Over Quantity*” yang ditulis oleh Shazia Sadiq dan Marta Indulska. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perhatian penulis melihat akan besarnya tujuan dari penerapan *open data* yang mana tujuan tersebut ialah bertujuan untuk membuka potensi inovasi bisnis, pemerintah, dan pengusaha, namun disamping itu penerapan *open data* juga memiliki tantangan signifikan yakni dalam penggunaannya secara efektif. Sementara banyak keberhasilan inovasi yang didasarkan pada paradigma *open data*, ada ketidakpastian mengenai kualitas data dari dataset tersebut. Ketidakpastian kualitas data ini merupakan ancaman terhadap nilai yang bisa dihasilkan dari data tersebut. Kualitas data sendiri telah banyak dipelajari secara ekstensif selama beberapa dekade dan banyak pendekatan terhadap manajemen kualitas data yang telah diusulkan. Namun, pendekatan ini biasanya didasarkan pada dataset internal organisasi, dengan metadata yang diketahui, dan pengetahuan domain dari semantik data. Membuka data, di sisi lain, sering terjadi ketidaktahuan bagi pengguna dan mungkin kekurangan metadata. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tantangan dalam menangani kualitas dataset yang terbuka, dan untuk menetapkan agenda penelitian di masa depan untuk mengatasi risiko guna mendapatkan nilai dari manfaat *open data*. Penelitian ini menghasilkan perhatian pada tiga bidang penelitian utama yang akan dilaksanakan agar dapat merealisasikan beberapa tujuan dan menghindari risiko serta masalah yang ada pada *open data* sebelumnya. Bidang pertama adalah pemahaman bersama tentang dimensi kualitas data. Beberapa penelitian baru-baru ini menganalisis kualitas data dari kumpulan *open data* telah mengindikasikan masalah yang sama dengan penelitian ini walaupun dengan dimensi kualitas dan metrik kualitas yang berbeda. Pemahaman bersama tentang bagaimana mendefinisikan dan menetapkan dimensi kualitas data mampu memberi patokan yang jelas sehingga meminimalisir adanya kesenjangan kualitas data. Bidang selanjutnya adalah meningkatkan pada kesadaran kualitas data. Salah satu risiko terbesar terkait penggunaan *open data* adalah kurangnya kesadaran akan kualitas yang melekat pada data. Oleh sebab itu bidang kedua ini dapat menghasilkan pengguna yang diberi pengetahuan dan kesadaran untuk mengolah data

layaknya produsen sehingga tingkat kualitas data dapat lebih signifikan. Bidang ketiga yaitu memperkuat kualitas data untuk manfaatnya secara universal.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan berfokus untuk mendeskripsikan tentang keterbukaan data pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dalam perspektif *open government data*. Penelitian terhadap keterbukaan data ini digunakan untuk memahami seberapa terbuka data yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sehingga beberapa pihak baik publik maupun antar instansi pemerintah dapat mengetahui terkait data yang dijadikan sebagai penunjang dalam upaya pembangunan kesehatan di Kota Surabaya. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah Bagaimana keterbukaan data pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dalam perspektif *open government data*? Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan keterbukaan data pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dalam perspektif *open government data*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode wawancara secara mendalam observasi, dan studi dokumen. Teknik penentuan informan dilakukan dengan purposive dimana pihak-pihak dianggap mengetahui terkait pengelolaan data pembangunan kesehatan. Teknik analisis data merujuk pada Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi yang terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Keterbukaan Data Pemerintah

Open government menjadi sebuah istilah (*term*) yang digunakan di dunia internasional dalam menginisiasikan upaya untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah dalam pelayanan publik. Sebagaimana pendekatan populer lainnya, istilah *open government* diartikan sebagai suatu hal yang berbeda untuk orang yang berbeda pula. Bagi sebagian orang, *open government* berarti memfasilitasi data dari pemerintah kepada masyarakat, mengubah hal lama yang dahulunya sebuah kebijakan dibuat secara tertutup menjadi sistem yang mana masyarakat menjadi memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh para pemimpin mereka. Bagaimanapun istilahnya, umumnya telah

dipahami bahwa *open government* memiliki makna yang lebih luas. Hal ini telah menjadi label yang mencakup semua hal yang lebih transparan, sistem pemerintahan yang mudah diakses dan responsif dimana data bersifat bebas untuk dan dari pemerintah melalui banyak sumber. Sehingga penting perannya agar para pembuat kebijakan harus responsif terhadap kebutuhan, gagasan dan prioritas masyarakat beserta badan eksternal, dan memberikan sumber yang efektif dan mudah diakses untuk disampaikan. Sementara itu, masyarakat, bisnis dan organisasi non-pemerintah harus pula memiliki akses mudah terhadap layanan dan informasi, keterampilan dan sarana untuk dipegang guna diperhitungkan dalam proses pengambilan kebijakan dan kesempatan untuk memberi pandangan terhadap pembuatan kebijakan. Informasi yang dapat diakses secara gratis dari pemerintah ke publik dan pihak ketiga seperti organisasi non-pemerintah dan media, akan secara kritis kembali dari masyarakat dan pihak ketiga kepada pihak pemerintah yang merupakan inti dari *open government* yang berfungsi dengan baik.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam keterbukaan pemerintah (*open government*) antara lain adalah.

a) Pemerintah harus transparansi

Transparansi mendorong akuntabilitas dan memberikan informasi bagi masyarakat tentang apa yang pemerintah lakukan. Informasi yang dikelola oleh pemerintah adalah aset nasional. Para administrator akan mengambil tindakan yang tepat, konsisten dengan hukum dan kebijakan, untuk mengungkapkan informasi dengan cepat dalam bentuk yang dapat dilakukan oleh masyarakat mudah ditemukan dan digunakan. Pemerintah dan lembaga eksekutif harus memanfaatkan teknologi baru untuk menaruh informasi tentang kegiatan dan kebijakan mereka secara online serta tersedia untuk umum. Departemen eksekutif dan lembaga juga harus meminta masukan dari masyarakat serta mengidentifikasi informasi yang menjadi prioritas umum

b) Pemerintah harus partisipatif

Keterlibatan publik meningkatkan efektivitas pemerintah dan meningkatkan kualitas kebijakannya. Pengetahuan tersebar luas di masyarakat, dan pejabat publik mendapat manfaat dari akses terhadap tersebarnya pengetahuan. Pemerintah dan lembaga eksekutif harus menawarkan masyarakat dalam meningkatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat kebijakan guna memberi manfaat kepada pemerintah melalui keahlian dan informasi yang dimiliki. Pemerintah dan lembaga eksekutif juga

harus meminta masukan dari masyarakat tentang bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kesempatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

c) Pemerintah harus kolaboratif dalam membuat inovasi

Kolaborasi secara aktif melibatkan masyarakat dalam pekerjaan pemerintah. Pemerintah dan lembaga eksekutif harus menggunakan alat yang inovatif, metode, dan sistem untuk bekerja sama diantara mereka sendiri, di semua tingkat pemerintahan, dan dengan organisasi nirlaba, bisnis, dan individu di sektor swasta. Pemerintah dan lembaga eksekutif harus meminta masukan dari masyarakat untuk dinilai dan meningkatkan tingkat kolaborasi mereka dan untuk mengidentifikasi peluang baru untuk kerja sama dalam membentuk sebuah inovasi.

Keterbukaan data pemerintah (*open government data*) adalah data yang dihasilkan dengan menggunakan dana publik dan memberikan "tanpa pembatasan penggunaan atau distribusi". Adapun dua elemen utama yang digunakan untuk mendefinisikan *open government data* ialah:

- Data pemerintah (*government data*): adalah data yang dihasilkan atau ditugaskan oleh badan publik.
- Data terbuka (*open data*): adalah data yang dapat digunakan secara bebas, digunakan kembali dan didistribusikan oleh siapapun, dan hanya berfokus pada kebutuhan pengguna sehingga membuat pekerjaan mereka mudah untuk dibagikan.

Jenis kumpulan data yang tersedia dalam penerapan *open government data* dapat bervariasi di semua tingkatan pemerintah dan instansi pemerintah. Secara hukum, *open government data* tidak dapat berisi informasi pribadi atau rahasia. Menurut Kassen, keterbukaan data pemerintah merupakan data pemerintah federal atau lokal yang menyediakan akses ke data yang dapat dibaca dengan format mesin (*machine readable*). Menurut sebuah studi portal *open government data* di seluruh dunia, umumnya terdapat sembilan kategori data diantaranya ialah kesehatan, keuangan dan ekonomi, lingkungan hidup, energi, pendidikan, transportasi, infrastruktur, lapangan kerja, dan populasi.

Dalam memahami *open government data* diperlukan pula pemahaman terkait rantai nilai *open government data* yang mana hal ini sangat penting guna memahami peran aktor utama, dan juga mengerti bagaimana kecepatan berkembang dan menyebabkan perubahan signifikan dalam peran dan batas tanggung jawab masing-masing dan mempengaruhi keterlibatan aktor dalam berbagai data yang terkait dengan

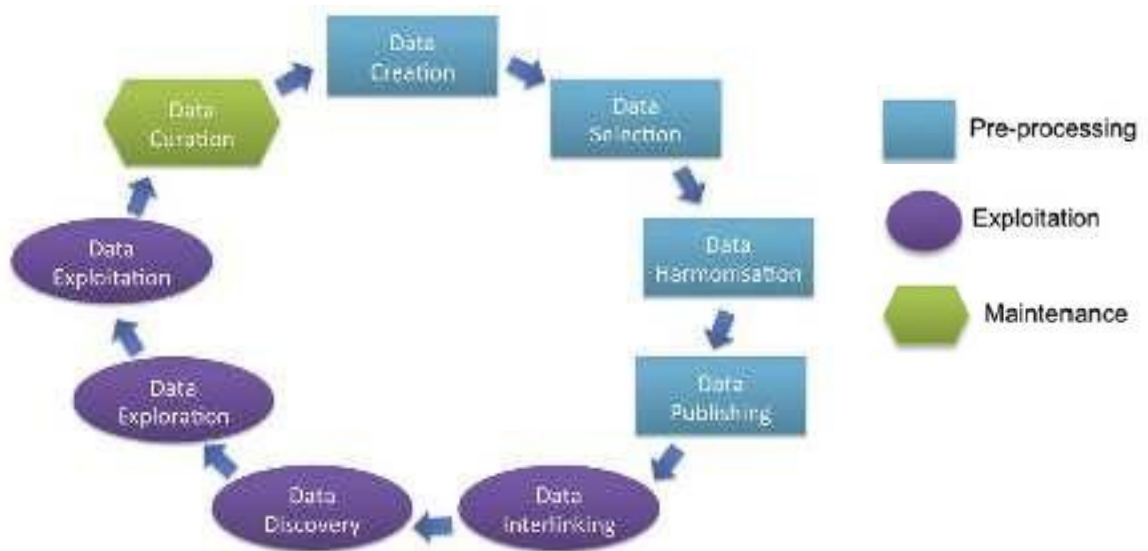
kegiatan pemerintah. Adapun empat fase utama yang dapat diidentifikasi dalam rantai nilai *open government data* ialah:

1. *Data generation* (peningkatan data): ini mencakup peningkatan data publik yang biasanya dilakukan oleh entitas sektor publik bahkan jika fungsi iniditingkatkan dapat menjadi sumber data dengan keuangan yang dipublikasikan.
2. *Data collection, aggregation and processing* (pengumpulan data, agregasi dan pengolahan): data perlu dikumpulkan agar dapat diakses, dibagikan dan digunakan kembali. Sebagian besar data pemerintah juga perlu digabungkan, dihubungkan, dan atau dimanipulasi sekali terbuka untuk memberi nilai tambah bagi sebagian besar pengguna. Hal ini terutama berlaku untuk penggunaan data pemerintah secara non komersial.
3. *Data distribution and delivery* (distribusi dan penyampaian data): data perlu didistribusikan ke pengguna untuk dapat diakses dan digunakan kembali.
4. *Final data use* (penggunaan data akhir): kebutuhan data pemerintah terbuka perlu digunakan kembali oleh seluruh daftar pengguna yang berbeda guna mempertahankan penciptaan nilai publik.

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *open government data* merupakan kumpulan data terkait berbagai kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang yang diproduksi oleh pihak pemerintah itu sendiri untuk selanjutnya agar dapat dikonsumsi oleh publik secara bebas sehingga dapat digunakan kembali tanpa izin sebagai bentuk keterbukaan pemerintah terhadap publik

Proses Keterbukaan Data Pemerintah

Dalam sub bab ini akan dibahas secara lengkap terkait siklus dalam *open government data*. Siklus ini biasa disebut dengan „*data life cycle*“. Adapun siklus data tersebut melalui beberapa tahap yang man tahapan tersebut dapat digambarkan sebagaimana gambar 1 berikut:



Gambar 1
Siklus Keterbukaan Data Pemerintah

- a) *Data Creation* (Penciptaan Data)
Siklus *open government data* biasanya dimulai dengan pembuatan data. Di badan publik atau pemerintah, penciptaan data biasanya merupakan bagian dari prosedur sehari-hari dengan mengumpulkan data untuk tujuan penerbitan tertentu.
- b) *Data Selection* (Pemilihan Data)
Proses ini memerlukan penghapusan data pribadi serta mengidentifikasi dimana kondisi data ini diterbitkan .
- c) *Data Harmonisation* (Harmonisasi Data)
Langkah ini melibatkan persiapan data yang akan diterbitkan agar sesuai dengan standar penerbitan, seperti delapan prinsip *open government data*. (dijelaskan lebih lanjut pada sub bab 1.5.4.5).
- d) *Publishing Data* (Penerbitan Data)
Ini merupakan tindakan aktual untuk membuka data dengan menerbitkannya diportal pemerintah.
- e) *Interlinking Data* (Data yang Terhubung)
Hal ini memungkinkan data yang dipublikasikan memiliki tambahan nilai, karena penghubung data memberikan interpretasi.
- f) *Data Discovery*
Penerbitan data tidak cukup untuk mengaktifkan penggunaan kembali. Publik harus menemukan adanya data terbuka agar bisa mengkonsumsinya.

Penemuan data dapat ditingkatkan dengan aktif meningkatkan kesadaran akan keberadaannya.

g) *Exploration Data* (Data Eksplorasi)

Langkah ini adalah cara mengkonsumsi data. Di sini, pengguna secara pasif memeriksa data terbuka dengan memvisualisasikan atau mencermati data tersebut.

h) *Exploitation Data* (Data Eksploitasi)

Eksploitasi data memungkinkan pengguna untuk secara proaktif menggunakan, menggunakan kembali atau mendistribusikan data terbuka dengan menganalisis, menggabungkan hingga memberi inovasi pada data tersebut.

i) *Data Curation* (Data Kurasi)

Data kurasi sangat penting dalam memastikan data yang dipublikasikan berkelanjutan. Ini melibatkan sejumlah proses, termasuk *update* data lama, dan lain-lain.

Manfaat Penerapan Keterbukaan Data Pemerintah

Dalam penerapan *open government data* tentu terdapat manfaat yang dapat dipetik dalam perspektif pemerintah. Adapun manfaat tersebut antara lain ialah:

- a) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, transparansi, responsif dan kontrol demokratis. *Open government data* memungkinkan *open government* mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Misalnya, asumsi umum adalah tidak adanya data di masyarakat menimbulkan pemikiran bahwa pegawai negeri terlibat dalam perilaku korupsi. *Open government data* bisa menjadi kekuatan yang hebat untuk akuntabilitas publik dengan membuat informasi yang tersedia lebih mudah untuk menganalisa, mengolah dan menggabungkan, sehingga memungkinkan adanya tingkat pengawasan publik yang tinggi. Oleh karena itu, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan respons yang dirasakan dari tindakan pemerintah
- b) Mempromosikan pemberdayaan warga, partisipasi dan keterlibatan sosial Asumsi kedua adalah bahwa *open government data* memungkinkan individu membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup mereka dan meningkatkan partisipasi dalam urusan publik. Penerapan ini bertujuan untuk memanfaatkan penggunaan teknologi informasi guna keterbukaan, transparansi dan kolaborasi di dalam sektor publik, namun juga untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam kehidupan

publik, Maraknya penggunaan teknologi dikombinasikan dengan munculnya gerakan *open government data* menjadi kunci pendorong pemberdayaan diri warga negara, partisipasi dan keterlibatan publik yang lebih tinggi.

- c) Membangun aparatur sipil negara yang diberdayakan. Manfaat penting yang juga dapat diambil dalam penerapan open government data adalah memberdayakan tenaga kerja sektor publik. Membuka data pemerintah dapat memungkinkan aparatur sipil negara yang lebih profesional untuk berpartisipasi secara langsung dalam memastikan bahwa pemerintah bersifat transparan dan partisipatif, serta untuk mengembangkan aplikasi yang lebih baik dalam menanggapi kebutuhan pengguna. Banyak aparatur sipil negara melihat bahwa real time performance memiliki dampak dalam pelayanan publik. Memberdayakan aparatur sipil negara dengan menerapkan open government data membutuhkan strategi dan program untuk membangun generasi penerus yang tidak hanya berhubungan dengan teknologi informasi melainkan mencakup: ilmu data, analisis prediktif untuk mengidentifikasi pola dan membuat model, pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk keterlibatan sosial dan untuk bernegosiasi dan terhubung dengan orang, serta pemahaman yang lebih baik terkait masalah yang muncul dan bagaimana teknologi mampu menyelesaikannya.
- d) Membina inovasi, efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah. Open government data memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan inovasi dalam pelayanan pemerintah. Melalui open government data dapat mengurangi beberapa kegiatan dalam pemerintahan. Perspektif penyampaian data terkait penggunaan layanan pemerintah dapat menyebabkan penurunan pertanyaan secara signifikan yang secara rutin diterima oleh otoritas publik, atau memungkinkan pertanyaan dijawab lebih cepat. Manfaat selanjutnya meliputi pengurangan beban kerja, penurunan dokumen dan biaya transisi yang lebih rendah. Selain itu, open government data menyediakan platform untuk pemberian layanan inovatif. Ini tidak hanya hasil dari penggunaan kembali data oleh aktor sektor swasta atau oleh organisasi non- pemerintah, namun juga berkat penggunaan kembali data oleh aparatur sipil negara yang mengambil inisiatif untuk mengembangkan aplikasi baru. Penggunaan teknologi dan analisis data dalam sektor publik, dan integrasi analisis dalam pembuatan kebijakan dan desain

pelayanan publik, dapat meningkatkan penyampaian layanan yang lebih terintegrasi dan inovatif. Akhirnya, penyampaian layanan yang lebih baik juga dapat muncul sebagai akibat dari inisiatif yang awalnya digerakkan oleh dorongan pemerintah untuk transparansi yang lebih besar seputar data.

Analisis dan Pembahasan

Transparansi menyangkut banyak segi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan seperti dalam proses perumusan kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan dana yang dipungut dari rakyat. Oleh karena itu sebuah keterbukaan perlu diupayakan oleh pemerintah. Melalui adanya keterbukaan pemerintah (*open government*) memungkinkan seseorang untuk mengambil bagian dalam karya luar biasa yang disebut dengan 'demokrasi'. Keterbukaan akan membebaskan semua orang mengungkapkan pendapat mereka dan merasa aman melakukannya. Keseriusan pemerintah dalam menerapkan *open government* ini didukung dengan tergabungnya Indonesia dalam *Open Government Partnership* yang bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen nyata sebagaimana yang dicanangkan oleh negara anggotanya. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah terbuka (*open government*) dalam melaksanakan pembangunan khususnya dalam bidang kesehatan ialah dengan terbukanya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terhadap data yang dimiliki. Keterbukaan data pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya sendiri dilihat berdasarkan tujuh aspek antara lain:

1. *Complete*
2. *Primary*
3. *Timely*
4. *Accessible*
5. *Machine readable*
6. *Non-discriminatory*
7. *License-free*

Berikut ini adalah interpretasi data.

Tabel 2
Interpretasi Keterbukaan Data Pemerintah terkait Pembangunan Kesehatan Kota Surabaya dalam Perspektif Open Government Data

	<i>Complete</i>	<i>Primary</i>	<i>Timely</i>	<i>Accessible</i>	<i>Machine Readable</i>	<i>Non-Discriminatory</i>	<i>License Free</i>
Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Data tidak secara keseluruhan dipublikasikan dan tidak terdapat wadah secara <i>online</i> untuk publik dapat memberikan usulan data (hanya melalui pengajuan permohonan data)	Data memiliki kerincian yang baik namun, hanya dipublikasikan dalam <i>e-data</i> (membutuhkan akun untuk mengakses) dan tidak terdapat ruang bagi publik untuk mengajukan pertanyaan terkait data (hanya ketika menerima data melalui permohonan data)	Data yang dimiliki badan diperbaharui secara berkala namun tidak dipublikasikan dan <i>progress</i> pembangunan yang dilakukan badan juga tidak dipublikasikan karena hanya membuat laporan di awal dan di akhir (<i>progress</i> hanya dibahas bersama OPD terkait)	Tidak mudah untuk mengakses data yang dimiliki badan karena terdapat pada <i>e-data</i> (harus memiliki akun untuk mengakses)	Data pembangunan tidak mudah untuk dibaca oleh mesin karena data dipublikasikan secara langsung melalui kolom pada <i>website</i> yang tersedia dan seperti untuk pendanaan dipublikasikan hanya pemasukan dan pengeluaran dengan format <i>pdf</i>	Data yang terdapat pada <i>e-data</i> tidak mudah untuk diakses (membutuhkan akun untuk mengakses) namun yang dipublikasikan pada <i>website</i> dapat digunakan kembali oleh siapapun	Terdapat data yang hanya untuk internal pemerintah meskipun tidak termasuk pada data yang dikecualikan namun terdapat pula yang bebas dari hak cipta
Dinas Kesehatan	Data agregat dipublikasikan namun, tidak terdapat wadah secara <i>online</i> untuk publik dapat memberikan usulan data (hanya melalui pengajuan permohonan data)	Data tidak dipublikasikan secara rinci begitu pula dengan data yang didapatkan publik melalui pengajuan permohonan dan tidak terdapat ruang bagi publik untuk mengajukan pertanyaan terkait data (hanya ketika menerima data melalui permohonan data)	Data yang dimiliki dinas tidak diberikan secara tepat waktu begitu pula dengan data yang diminta melalui pengajuan permohonan (diberikan sesuai dengan pembaharuan terakhir)	Data agregat yang telah dipublikasikan pada <i>website</i> seperti pada profil kesehatan dapat diakses tanpa batasan namun selain itu harus melalui permohonan	Data tidak mudah untuk dibaca mesin karena baik data agregat yang terdapat di <i>website</i> maupun yang diberikan kepada pemohon data harus diberikan dalam format <i>word</i> dan <i>pdf</i>	Data agregat yang dipublikasikan pada <i>website</i> dapat digunakan kembali oleh siapapun namun, data yang didapatkan dari pengajuan permohonan data harus melalui surat resmi	Data agregat yang terdapat pada <i>website</i> bebas untuk diakses tanpa izin namun data yang didapatkan melalui pengajuan permohonan data memiliki hak cipta dan hanya dapat digunakan oleh pemohon
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Data yang dibutuhkan terkait pembangunan kesehatan	Data yang diberikan kepada badan/dinas yang	Data yang dibutuhkan oleh dinas terkait (Dinas Kesehatan)	Data yang dibutuhkan hanya dapat diakses oleh tim tertentu	Data yang diberikan kepada dinas yang melakukan	Data yang diberikan kepada dinas yang melakukan Perjanjian Kerja	Data agregat yang terdapat pada <i>website</i> bebas untuk diakses tanpa
	termasuk pada data yang dikecualikan sehingga tidak dipublikasikan namun, untuk mendapatkan data tersebut dinas terkait perlu melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Data yang dipublikasikan pada <i>website</i> hanya data agregat akan tetapi apabila publik membutuhkan data tertentu seperti terkait golongan darah, publik dapat mengajukan	melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) diberikan secara rinci namun, data untuk publik tidak diberikan secara rinci hanya dalam data agregat dan tidak terdapat ruang bagi publik untuk mengajukan pertanyaan terkait data (hanya ketika menerima data melalui permohonan data)	yakni data kependudukan diberikan secara tepat waktu dan diperbaharui secara <i>realtime</i> namun, data agregat untuk masyarakat kami berikan secara berkala melalui profil kependudukan	dari Dinas Kesehatan namun, untuk data agregat yang telah dipublikasikan di <i>website</i> publik dapat dengan mudah untuk mengaksesnya	Perjanjian Kerja Sama (PKS) maupun yang diberikan kepada publik cukup mudah untuk dibaca mesin karena format yang digunakan dalam penyimpanan ialah dengan <i>excel</i>	Sama (PKS) tidak mudah untuk diakses mengingat hanya tim tertentu yang dapat mengakses data yang diajukan melalui permohonan tidak diperkenankan untuk diberikan kepada siapapun kecuali pemohon. Akan tetapi terkait data agregat yang dipublikasikan pada <i>website</i> dapat dengan mudah untuk diakses	izin namun data yang didapatkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pengajuan permohonan data memiliki hak cipta dan hanya dapat digunakan oleh tim tertentu dan pemohon

	permohonan karena data tersebutpun tidak dipublikasikan begitu pula dengan data lainnya yang membutuhkan pengelolaan.						
Dinas Komunikasi dan Informatika	Data mentah tidak diberikan kepada publik namun, data agregat terkait jumlah <i>e-kiosk</i> yang terdapat di rumah sakit dan puskesmas kami berikan kepada publik. Akan tetapi dalam hal ini dinas tidak memiliki wadah secara <i>online</i> untuk publik dapat	Data yang tertera pada <i>website</i> terkait <i>e-kiosk</i> tidak diberikan secara rinci melainkan hanya jumlahnya saja dan tidak terdapat ruang bagi publik untuk mengajukan pertanyaan terkait data (hanya ketika	Data yang dipublikasikan hanya diperbarui secara berkala sehingga data yang dipublikasikan tidak diperbaharui bersesuaian dengan apa yang sedang dilakukan dinas	Data agregat yang telah dipublikasikan pada <i>website</i> seperti jumlah <i>e-kiosk</i> dapat diakses tanpa batasan namun selain itu harus melalui permohonan	Data tidak mudah untuk dibaca mesin karena baik data agregat yang terdapat di <i>website</i> maupun yang diberikan kepada pemohon data diberikan dalam format <i>pdf</i>	Data agregat yang dipublikasikan pada <i>website</i> dapat digunakan kembali oleh siapapun namun, data yang didapatkan dari pengajuan permohonan data harus melalui surat resmi	Data agregat yang terdapat pada <i>website</i> bebas untuk diakses tanpa izin namun data yang didapatkan melalui pengajuan permohonan data memiliki hak cipta dan hanya dapat digunakan oleh pemohon
	memberikan usulan data (hanya melalui pengajuan permohonan data)	menerima data melalui permohonan data)					
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Terdapat data yang dipublikasikan namun tidak secara keseluruhan dan dinas tidak memiliki wadah secara <i>online</i> untuk publik dapat memberikan usulan data (hanya melalui pengajuan permohonan data)	Data tidak diberikan secara rinci kepada publik, dan apabila terdapat program yang dijalankan bersama masyarakat yang mengetahui rincian data tersebut hanya dinas dan masyarakat yang terlibat dalam program dan tidak terdapat ruang bagi publik untuk mengajukan pertanyaan terkait data (hanya ketika menerima data melalui permohonan data)	Data yang dipublikasikan tidak diberikan secara tepat waktu melainkan secara berkala sehingga data yang dipublikasikan tidak diperbaharui bersesuaian dengan apa yang sedang dilakukan dinas	Data yang telah dipublikasikan pada <i>website</i> seperti harga bahan pokok dapat diakses tanpa batasan namun selain itu harus melalui permohonan	Data tidak mudah untuk dibaca mesin karena data yang terdapat di <i>website</i> maupun yang diberikan tidak dalam bentuk file melainkan mengisi pada kolom yang tertera pada <i>website</i>	Data agregat yang dipublikasikan pada <i>website</i> dapat digunakan kembali oleh siapapun namun, data yang didapatkan dari pengajuan permohonan data harus melalui surat resmi	Data agregat yang terdapat pada <i>website</i> bebas untuk diakses tanpa izin namun data yang didapatkan melalui pengajuan permohonan data memiliki hak cipta dan hanya dapat digunakan oleh pemohon
		untuk mengajukan pertanyaan terkait data (hanya ketika menerima data melalui permohonan data)					
Dinas Lingkungan Hidup	Terdapat data agregat yang dipublikasikan namun tidak secara keseluruhan dan dinas tidak memiliki wadah secara <i>online</i> untuk publik dapat memberikan usulan data (hanya melalui pengajuan permohonan data)	Data agregat tidak diberikan secara rinci kepada publik dan tidak terdapat ruang bagi publik untuk mengajukan pertanyaan terkait data (hanya ketika menerima data melalui permohonan data)	Data agregat yang dipublikasikan tidak diberikan secara tepat waktu melainkan secara berkala sehingga data yang dipublikasikan tidak diperbaharui bersesuaian dengan apa yang sedang dilakukan dinas	Data agregat yang telah dipublikasikan pada <i>website</i> seperti jumlah limbah dapat diakses tanpa batasan namun selain itu harus melalui permohonan	Data agregat tidak mudah untuk dibaca mesin karena data dipublikasikan dalam format <i>pdf</i>	Data agregat yang dipublikasikan pada <i>website</i> dapat digunakan kembali oleh siapapun namun, data yang didapatkan dari pengajuan permohonan data harus melalui surat resmi	Data agregat yang terdapat pada <i>website</i> bebas untuk diakses tanpa izin namun data yang didapatkan melalui pengajuan permohonan data memiliki hak cipta dan hanya dapat digunakan oleh pemohon

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Terdapat data agregat yang dipublikasikan namun tidak secara keseluruhan dan dinas tidak memiliki wadah secara <i>online</i> untuk publik dapat memberikan usulan data (hanya melalui pengajuan permohonan data)	Data agregat tidak diberikan secara rinci kepada publik namun publik dapat menanyakan apabila terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan yang dipublikasikan melalui <i>website, email, twitter</i> dan <i>instagram</i>	Data agregat yang dipublikasikan tidak diberikan secara tepat waktu melainkan secara berkala sehingga data yang dipublikasikan tidak diperbaharui bersesuaian dengan apa yang sedang dilakukan dinas	Data agregat yang telah dipublikasikan pada <i>website</i> seperti jumlah sampah di setiap kecamatan dapat diakses tanpa batasan namun selain itu harus melalui permohonan	Data agregat tidak mudah untuk dibaca mesin karena data dipublikasikan dalam format <i>pdf</i>	Data agregat yang dipublikasikan pada <i>website</i> dapat digunakan kembali oleh siapapun namun, data yang didapatkan dari pengajuan permohonan data harus melalui surat resmi	Data agregat yang terdapat pada <i>website</i> bebas untuk diakses tanpa izin namun data yang didapatkan melalui pengajuan permohonan data memiliki hak cipta dan hanya dapat digunakan oleh pemohon
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan, Cipta Karya dan Tata Ruang	Terdapat data yang dipublikasikan namun tidak secara keseluruhan dan dinas tidak memiliki wadah secara <i>online</i> untuk publik dapat memberikan usulan data (hanya melalui pengajuan permohonan data)	Data tidak diberikan secara rinci kepada publik namun publik dapat menanyakan apabila terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan yang dipublikasikan melalui <i>website, email, twitter</i> dan <i>instagram</i>	Data yang dipublikasikan secara tepat waktu karena berkaitan dengan pelelangan pembangunan yang akan dilakukan namun <i>progress</i> pembangunan tersebut tidak diperbaharui bersesuaian dengan yang dilakukan	Data terkait pelelangan yang dipublikasikan pada <i>website</i> dapat diakses tanpa batasan namun selain data tersebut harus melalui permohonan	Data tidak mudah untuk dibaca mesin karena data dipublikasikan dalam kolom <i>website</i>	Data agregat yang dipublikasikan pada <i>website</i> dapat digunakan kembali oleh siapapun namun, data yang didapatkan dari pengajuan permohonan data harus melalui surat resmi	Data yang terdapat pada <i>website</i> bebas untuk diakses tanpa izin namun data yang didapatkan melalui pengajuan permohonan data memiliki hak cipta dan hanya dapat digunakan oleh pemohon

Sumber: primer penelitian

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa:

1. *Complete*

Seluruh data pembangunan kesehatan arus dipublikasikan secara *online* oleh badan/dinas terkait. Adapun data yang dimaksud adalah data yang tidak tunduk pada privasi, dan keamanan yang berlaku atau pembatasan hak istimewa. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) baik badan ataupun dinas mempublikasikan data pembangunankesehatan namun tidak secara keseluruhan dan tidak terdapat wadah secara *online* bagi publik untuk mengusulkan data yang dipublikasikan.

2. *Primary*

Data pembangunan kesehatan dikumpulkan secara langsung dari badan/dinas terkait, dengan tingkat rincian (detail) tertinggi, tidak dalam bentuk yang dimodifikasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data pembangunan kesehatan dipublikasikan secara langsung oleh badan/dinas terkait namun, dengan tingkat rincian (detail) yang rendah.

3. *Timely*

Data pembangunan kesehatan tersedia untuk umum sesegera mungkin setelah data dibuat guna menjaga nilai data. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data

pembangunan kesehatan tidak dipublikasikan secara tepat waktu melainkan secara berkala

4. *Accessible*

Data pembangunan kesehatan tersedia untuk publik, dan tanpa batasan penggunaannya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data pembangunan kesehatan yang terpublikasikan tersedia untuk publik, dan tanpa batasan penggunaannya.

5. *Machine readable*

Data pembangunan kesehatan terstruktur sehingga memungkinkan data terproses secara otomatis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data pembangunan kesehatan tidak dapat terproses secara otomatis karena format yang digunakan dalam penyimpanan data ialah *word*, *pdf*, dan hanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyimpan data dalam format *excel*

(hanya bagi dinas yang melakukan Perjanjian Kerja Sama).

6. *Non-discriminatory*

Data pembangunan kesehatan dapat digunakan kembali oleh siapapun tanpa persyaratan apapun. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data pembangunan kesehatan yang dipublikasikan dapat digunakan kembali oleh siapapun tanpa persyaratan apapun.

7. *License-free*

Data pembangunan kesehatan tidak tunduk pada peraturan hak cipta apapun sesuai dengan pembatasan privasi, keamanan dan hak istimewa yang diperbolehkan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data pembangunan kesehatan yang dipublikasikan tidak tunduk pada peraturan hak cipta namun lebih banyak data yang memiliki hak cipta sehingga membutuhkan pengajuan permohonan untuk mendapatkannya

Kesimpulan

keterbukaan data pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dalam perspektif *open government data*, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbukaan data pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya tersebut belum optimal. Data tidak memiliki tingkat detail, tidak update, dan tidak dipublikasikan dalam format terbuka. Terdapatnya ego sektoral antar badan/dinas dalam menerapkan *open government data*;

Kekhawatiran pemerintah pada respon masyarakat dalam menghadapi data; Kurangnya pegawai yang ahli dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Daftar Pustaka

- Attard, J. (2015). *A Systematic Review of Open Government Data Initiatives*. *Scimedirect*.
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X1500091X>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *IPKM: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Balitbangkes.
<http://terbitan.litbang.depkes.go.id/penerbitan/index.php/lpb/catalog/download/24/24/49-1>
- Carrara, W. (2015). *Creating Value Open Data*. *European Commission*.
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_creating_value_rough_open_data_0
- Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (2015). *Profil Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2015*.
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2015/3578_Jatim_Kota_Surabaya_2015.pdf
- Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (2017). *Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016-2021*. Surabaya: Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
<http://dinkes.surabaya.go.id/portal/REVIEW%20RENSTRA%20DINKES%202016-2021-2%20Mei%202017%28Cetak%29.pdf>
- Gavelin, K. (2009). *Open Government: Beyond Static Measures*. *Involve..*
<http://www.oecd.org/gov/46560184.pdf>
- Global Competitiveness Index. (2016). *Global Competitiveness Report 2015-2016*.
http://www.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
- Harrison et al. (2012). *Open Government and E-Government: Democratic Challenges from a Public Value Perspective*. IOS Press, Information Polity 17 (2012)

- Kantor Staf Presiden. (2017). *Ketrebukaan Informasi Publik dan Komitmen Nawacita. 26 Januari 2017*. <http://ksp.go.id/keterbukaan-informasi-publik-dan-komitmen-nawacita/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Ketahanan Pangan di Indonesia*. Jakarta: *Buletin Jendela Data dan Informasi*. <https://www.medbox.org/ketahanan-pangan-di-indonesia/download.pdf>.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Okamoto, K.. (2016). *Introducing Open Government Data*. *The Reference Librarian* 58. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02763877.2016.1199005?journalCode=wref20>
- Open Data Barometer. (2017). *Open Data Barometer: Global Report Fourth Edition*. The World Wide Web Foundation. <http://opendatabarometer.org/doc/4thEdition/ODB-4thEdition-GlobalReport.pdf>
- Open Data Barometer. (2017). *Country Detail*. *The World Wide Web Foundation*. http://opendatabarometer.org/4thedition/detail-country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=IDN
- Open Government Indonesia. (2017). *Bagaimana OGI Bekerja*. [Opengovindonesia.org](http://www.opengovindonesia.org). <http://www.opengovindonesia.org/about/1/open-government-indonesia>